

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggung jawabnya.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapahal, antarlain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan , maka telah dihasilkan pula peraturan-perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ,yang

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Azlina,2011).

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur *monitoring* yang didasarkan pada informasi.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang ada di propinsi Sulawesi selatan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) sejak tahun 2016 sampai 2019. Pemerintah Kota Palopo memperoleh predikat tersebut dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk keempat kalinya secara berturut turut (<http://radarluwuraya.com> 2019). Predikat badan pemeriksa (BPK) ini menjadi tolak ukur untuk mengukur apakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo memenuhi standar. Publik mempersepsi bahwa opini WTP mencerminkan penggunaan keuangan yang benar, padahal berulang kali BPK mengingatkan bahwa lembaga yang mendapat opini WTP tidaklah di jamin bebas dari korupsi.

Opini WTP hanya sekedar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan tiap-tiap lembaga. Namun masih banyak daerah yang sudah meraih opini WTP tetapi banyak di temukan masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di kutip dalam (<http://www.cnbcindonesia.com> , 2019) oleh karena itu peneliti mengambil objek pada kantor BPKAD Kota Palopo.

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lakukan oleh riska dwi dan fitriana (2018) menyimpulkan bahwa secara simultan atau bersama sama variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara simultan atau bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan penelitian yang di lakukan rio pratama (2019) Pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab.Padang Pariaman. Sedangkan Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab.Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas,dan terdapat perbedaan hasil penelitian dapat diangkat sebagai permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dari latar belakang di atas yaitu :

- a. Apakah Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo?
- b. Apakah Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo?
- c. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintahan daerah untuk lebih memahami peran pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkhusus Daerah Kota Palopo. Peran pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berperan penting bagi suatu instansi pemerintah, oleh karena itu peran pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah Kota Palopo.

#### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian diharapkan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap daerah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kota Palopo.

### **1.4.3 Manfaat kebijakan**

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan baik bagi entitas perusahaan atau lembaga untuk menetapkan sistem evaluasi kinerja manajemen. Lebih dari itu penelitian ini juga merupakan referensi untuk mengkaji akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar membawa kemajuan pada sistem kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selama ini berjalan.

### 1.5. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian adalah upaya membatasi masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus di lakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu lebih fokus untuk di lakukan. adapun penjelasan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban sesuatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Jadi adapun Aspek-aspek yang di duga berpengaruh yakni.

#### 1). Pengendalian akuntansi (*accounting control*)

Pengendalian akuntansi secara umum merupakan bagian dari sisi sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

#### 2). Sistem pelaporan (*reporting sistem*)

Sistem pelaporan yang baik di perlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan oleh instansi atau organisasi.

#### 3) Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat di mengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut terhadap instansi atau sebuah organisasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengendalian Akuntansi

Menurut definisi, pengendalian (*control*) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang tepat.

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya, melalui pengukuran prestasi kerja dengan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pengendalian akuntansi mencakup semua aset dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah.

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* atau selisih yakni metode analisis statistik inferensi terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi kedepan.



Pengendalian Akuntansi Menurut John Wiley dan Sons, Inc (1995:102) menjelaskan bahwa “Pengendalian Akuntansi (*Accounting Controls*) berkaitan dengan rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang menyangkut penjagaan aktiva dan keandalan catatan keuangan karena itu dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai : (1).Transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen yang bersifat umum atau khusus (2). Transaksi dicatat seperlunya untuk memungkinkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau kriteria lain yang dapat diterapkan pada laporan semacam itu dan untuk menjaga tanggung gugat (*Accountability*) atas aktiva.

Pengendalian Akuntansi Menurut Krismiaji (2010:18) adalah sebagai berikut “Pengendalian Akuntansi (*Accounting Controls*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin asurasi dan daya andal catatan keuangan.”

Menurut Maddox (2000) menyatakan bahwa pengendalian adalah “Sebuah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif”.

## **2.2 Sistem Pelaporan**

Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*Sytema*” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain.

Menurut Mulyanto (2009:1) sistem dapat diartikan sebagai berikut: “Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan”.

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem.

Halim (2007: 326) menjelaskan bahwa Laporan keuangan adalah: “Informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut”. Sedangkan Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

Menurut Ismaya (2005:490) pengertian pelaporan keuangan adalah: “Suatu laporan yang disertai segala implementasinya dengan melalui penyiapan neraca dan ikhtisar laba rugi”.

Menurut Midjan (1986:85) sistem pelaporan yang baik adalah “Dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP : 2000) mengemukakan laporan yang baik adalah

“Laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan”.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Kerangka Konseptual; 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP), Komponen – komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan Pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca.
- d. Laporan Operasional (LO).
- e. Laporan Arus Kas (LAK).
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

### **2.3 Sasaran Anggaran**

Menurut Suharono dan Solichin (2006) “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.”

Menurut Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan, yaitu: tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi

Menurut Mardiasmo (2002) “Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk pencapaian kuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.”

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Supriyono (2000) dalam Mahanani (2009) “Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.” Sementra itu, Menurut Garrison & Noreen (2000) dalam Safitri (2006) “Anggaran adalah rencana rinci

tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.”

Menurut Kenisdalam Kurnis (2004) indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah :

- a. Jelas, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda.
- b. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi bermacam-macam.
- c. Mengerti, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.

Menurut Yusfaningrum (2005) “Anggaran merupakan pedoman rencana manajemen dimasa yang akan datang mempunyai beberapa manfaat. anggaran memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, dan berarti anggaran mewakili kesepakatan dari negosiasi diantara partisipasi dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan pada masa yang akan datang
- b. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai rencana jangka panjang aktivitas perusahaan.
- c. Sebagai alat komunikasi antar divisi, dimana anggaran sangat membantu melakukan komunikasi internal antar divisi dalam organisasi maupun dalam manajemen puncak. Disamping memiliki manfaat, anggaran juga

memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah anggaran dapat menimbulkan perasaan tertekan bagi karyawan. Hal ini terjadi apabila anggaran disusun terlalu kaku atau target yang ditetapkan dalam anggaran sulit untuk dicapai.

#### **2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

PP105 tahun 2000 dan PP108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan serta memperjelas pembahasan dalam penelitian. Berikut ini adalah uraian singkat dari hasil penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1** Penelitian terdahulu

<b>NO</b>	<b>Nama,Tahun,Judul Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Riska Dwi Fitriana (2018) Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Dan Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah kabupaten situbondo	Metode kuantitatif	Hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama variabel Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_1$ ) dan variabel Pengendalian Akuntansi ( $X_2$ ) dan Sistem Pelaporan ( $X_3$ ) secara simultan atau bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.(Y)
2	Rio Pratama (2019) Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman	Metode kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (2) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (3)

- Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman.
- 3 Cahyani dan utama(2015) Metode Hasil penelitian ini Pengaruh kejelasan sasaran kuantitatif menunjukkan bahwa kejelasan anggaran, pengendalian sasaran anggaran, akuntansi, dan sistem pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - 4 Hari setiawan (2017) Metode Hasil penelitian ini Pengaruh kejelasan sasaran kuantitatif menunjukkan bahwa anggaran, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Kampar riau, selain itu dengan manajerial sebagai variabel modering interaksi kinerja manajerial terhadap ketiga variabel indeviden tersebut berpengaruh positif.
  - 5 Wahdatul, rahayu, dan Metode Hasil penelitian ini menyatakan Pengaruh kuantitatif bahwa anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan secara simultan



- terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bandung maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bandung
- 6 Lomenta, morasa dan mawikere(2016) Metode kuantitatif Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daera dan ketaatan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota minahasa selatan. Sedangkan untuk ketaatan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota minahasa selatan.
- 7 Zakiyudin dan suyanto (2015) Metode kuantitatif Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada inspectoral jendral kementerian agama RI. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
- 8 Karismawati agustin (2018) Metode kuantitatif Pengaruh kejelasan Sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Hasil studi empiris menunjukkan bahwa (1) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) pengendalian

pemerintah .  
(Studi pada SKPD di  
pemerintah kota Yokyakarta)

akuntansi berpengaruh positif  
dan signifikan terhadap  
akuntabilitas kinerja instansi  
pemerintah, (3) sistem  
pelaporan berpengaruh  
positif dan tidak signifikan  
terhadap akuntabilitas kinerja  
instansi pemerintah dan (4)  
ketaatan peraturan  
perundangan berpengaruh  
positif dan tidak signifikan  
terhadap akuntabilitas kinerja  
instansi pemerintah.

9 Mulyadi AR  
  
(2018) Pengaruh sistem  
pelaporan dan kejelasan  
sasaran anggaran  
  
terhadap akuntabilitas  
kinerja Instansi Pemerintah  
Aceh

Metode  
kuantitatif

Hasil penelitian diperoleh  
bahwa sistem pelaporan dan  
kejelasan

sasaran anggaran secara  
simultan berpengaruh  
signifikan terhadap kinerja  
Pemerintah Aceh. Sistem  
pelaporan

secara parsial berpengaruh  
signifikan terhadap  
akuntabilitas kinerja Instansi  
Pemerintah Aceh.  
Kejelasan

sasaran anggaran secara  
parsial berpengaruh  
signifikan terhadap

			akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh.
			Sistem pelaporan lebih dominan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh.
10	Hidayahtullah, herdjiono (2015) ` Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD di marauke	Metode kuantitatif	Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah marauke.

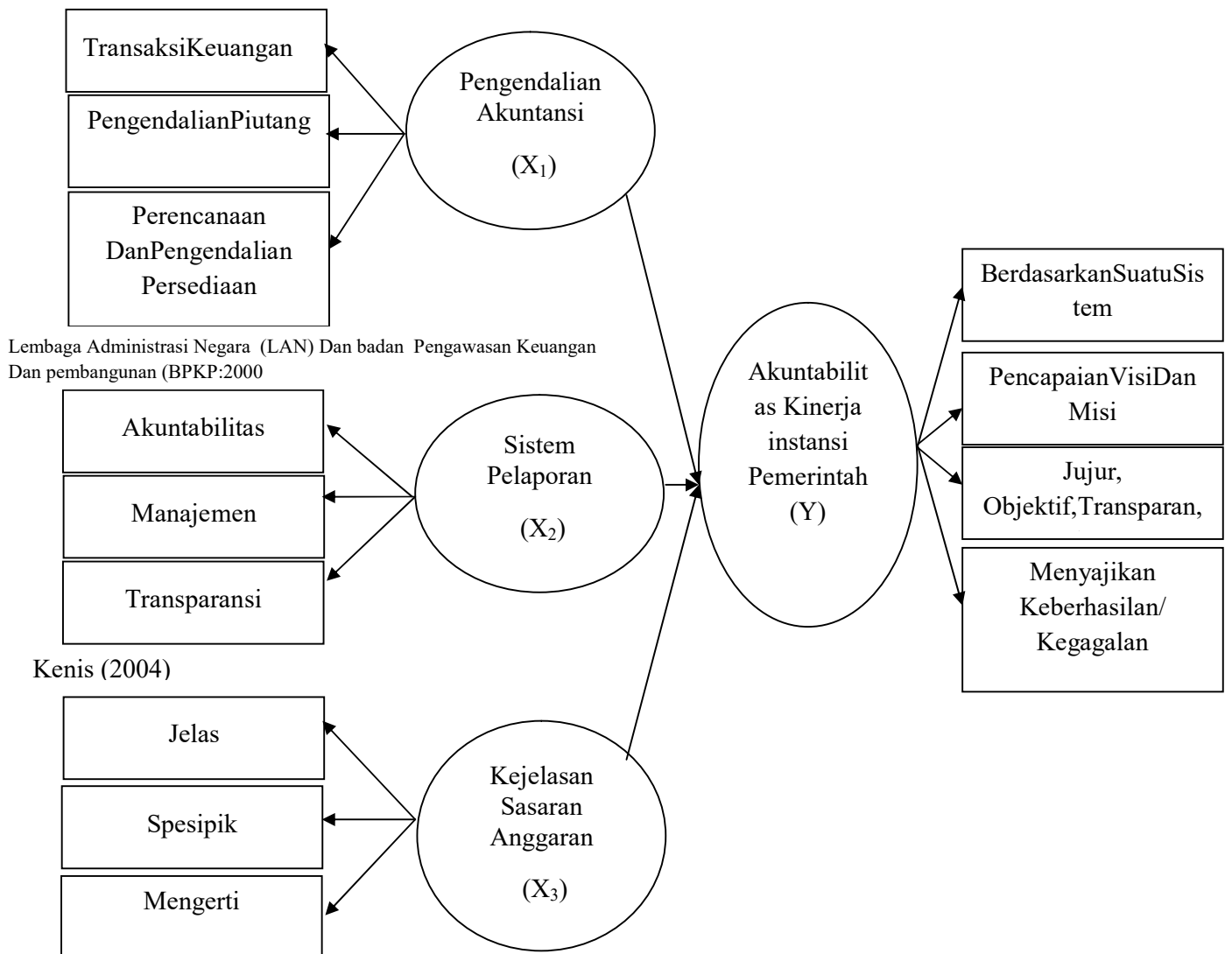
## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antara Variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan sasaran anggaran terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah Daerah Kota Palopo.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan Kerangka Konseptual Penelitian sebagai berikut :

John WILEY Dan sons, Inc (1995:102)



**Gambar 1.1**

## **Kerangka konseptual**

### **2.7 Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu (Mundilarso). Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang di ajukan dan kajian teori yang di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- H1** : Diduga pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palopo.
- H2** : Diduga sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palopo.
- H3** : Diduga kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016:86)

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Pada penelitian ini akan mengambil surat permohonan izin dilokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Jl. Jend Sudirman No.163, Binturu, Wara Selatan., Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang dibutuhkan selama 2 bulan.

#### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden pada Kantor Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo. Data ini merupakan respon tertulis dari responden (Pegawai Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Palopo yang dijadikan sampel penelitian.

Sumber data lainya itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*). *Library Research* dilakukan dengan mempelajari teori-teori ataupun konsep yang telah ada pada buku, jurnal, makalah dan karyailmiah. *LibraryResearch* juga dilakukan dengan mengakses *website* atau situs-situs yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan penelitian ini.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut sugiono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala BPKAD, sekertariat, bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi sebanyak 112 .

### 3.4.2 Sampel

Menurut sugiono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini di gunakan dengan metode sampel acak. Pengambilan sampel acak sederhana untuk pengambilan sampel. Alasan dikatakan sederhana atau (simpler) adalah karna anggota populasi di ambil sampelnya secara acak tanpa mempertimbangkan kelas-kelas yang ada dalam populasi. Cara ini akan di lakukan bila anggota populasi homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat di lakukan melalui undian, pemilihan nomor dari daftar acak, dan lain lain (sugiono,2017). Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk di jadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rumus slovin: } n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :  
 $n$  = ukuran sampel  
 $N$  = ukuran populasi  
 $e$  = tingkat kesalahan (10%)

Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka dapat diketahui jumlah sampel pada penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{112}{1 + 112 \cdot (0,1)^2} = 52,8 \text{ dibulatkan menjadi } 53 \text{ orang.}$$

dari hasil perhitungan sampel diatas, maka dapat ketahui jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu 53 (dibulatkan) yang berperan dalam kantor BPKAD Kota Palopo.



### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang mendukung guna membahas masalah, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Kuesioner (*questionnaire*) yang diberikan, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar pernyataan yang telah disusun secara terstruktur di berikan kepada pegawai yang di jadikan sampel.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pertanyaan tidak terstruktur kepada pihak yang berhak dan berwenang mengenai pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Penelitian pustaka (*library Research*)  
Penelitian di maksudkan untuk mengumpulkan data melalui penelitian terhadap buku-buku literature yang berhubungan dengan topik dan masalah yang diteliti.

### 3.6 Uji validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor (Ghozali,2005:39). Pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari model kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. Reliabilitas artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat

dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Reabilitas ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu, atau skor  $-z$ , relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes equivalen.

### **3.7 Metode Analisis Data**

#### **1. Metode Deskriptif**

Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data mengenai pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palopo, maka di gunakan Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel bebas, yaitu pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel devenden akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. kemudian indikator tersebut dikembangkan menjadi instrumen.

Langkah-langkah menggunakan metode kuantitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan angket yang telah diisi responden dan mengisi kelengkapan
- b. Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif
- c. Membuat tabel distribusi jawaban angket
- d. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden
- e. Memasukkan skor dalam rumus deskriptif persentase

f. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori

Pemberian skor dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden sebagai berikut :

- a. Jawaban sangat setuju responden diberi skor 5
- b. Jawaban setuju responden diberi skor 4
- c. Jawaban kurang setuju responden diberi skor 3
- d. Jawaban tidak setuju responden diberi skor 2
- e. Jawaban sangat tidak setuju responden diberi skor 1

**Tabel 3.1 Interval Persen**

No	Interval Persen	Kriteria
1	84% - 100%	Sangat Setuju
2	68% - 84%	Setuju
3	52% - 68%	Ragu-Ragu
4	36% - 52 %	Tidak Setuju
5	≤ 36%	Sangat Tidak Setuju

## 2. Metode Kuantitatif

Untuk menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Palopo yaitu menggunakan dengan metode analisis regresi berganda.

Menurut (Algfari,2000:62) formulasi regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
B <sub>0</sub>	= Konstanta
B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , B <sub>3</sub>	= Koefisien Regresi
X <sub>1</sub>	= Pengendalian akuntansi
X <sub>2</sub>	= Sistem pelaporan
X <sub>3</sub>	= Kejelasan sasaran anggaran

### 1) Koefisien Korelasi (R)

Guna mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel yang dianalisis, dimana hubungan dinyatakan oleh besarnya angka koefisien korelasi dan arah dinyatakan oleh tanda positif atau negatif. Apabila  $r = + 1$  atau mendekati  $+ 1$ , maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif, sangat kuat dan bersifat searah, artinya kenaikan atau penurunan nilai X terjadi bersama dengan kenaikan atau penurunan nilai Y.

### 2) Uji Statistik (uji parsial)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau *independent* secara *individual* dalam menerangkan variasi variabel *dependent*. Hipotesis yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, seperti berikut ini.

Ho :  $b_i = 0$ , berarti tidak ada pengaruh antara pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran, secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H1 :  $b_i = 0$ , berarti ada pengaruh antara antara pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran, secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

syarat melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.
- b. Apabila  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.
- c. Derajat kesalahan ( $\alpha$ ) 0.005 atau 5%.

Selain menggunakan persamaan linier di atas, peneliti juga menggunakan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS versi 20. Penentuan berpengaruh atau tidak antar variabel bebas dan terikat di tentukan dengan nilai signifikansi (sig) dengan persamaan sebagai berikut:

1. Apabila nilai sig  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau tidak berpengaruh
2. Apabila nilai sig  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau berpengaruh.

### 3.8 Defenisi Operasional

Guna mendapatkan pemahaman yang sama tentang beberapa defenisi, maka berikut ini di sajikan defenisi operasional:

- a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah terutama kantor BPKAD Kota Palopo, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

PP105 tahun 2000 dan PP108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik di ruang lingkup instansi pemerintah daerah Kota Palopo.

b. Pengendalian Akuntansi ( $X_1$ )

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) kantor BPKAD Kota Palopo harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi ke depan.

c. Sistem Pelaporan ( $X_2$ )

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo (2009). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran *financia* dan *non financia*” yang harus di sertakan dalam sistem pelaporan kantor BPKAD Kota Palopo.

d. Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_3$ )

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas terutama kantor BPKAD Kota Palopo, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kantor BPKAD Kota Palopo**

##### **4.1.1 Sejarah singkat BPKAD Kota Palopo**

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

##### **4.1.2 Tugas dan fungsi BPKAD Kota Palopo**

Secara umum kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan berdasarkan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)



Penyelenggaraan kegiatan teknik operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- c. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekaligus Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **4.1.3 Visi dan Misi (BPKAD)**

##### **a. Visi**

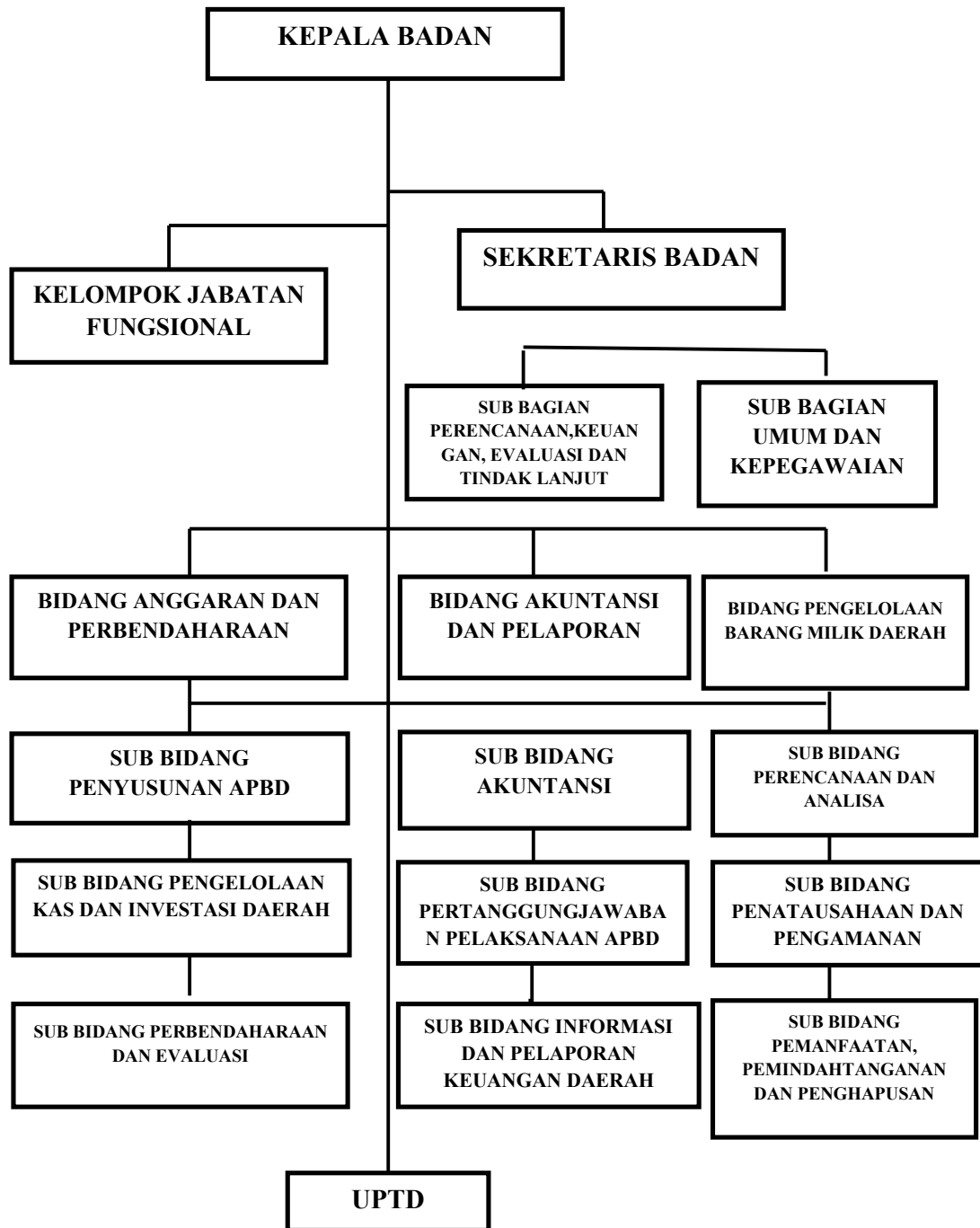
” Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya, Dan Lingkungan Yang Berkemuka Di Indonesia

**b. Misi**

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

**4.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

## 4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD kota palopo. Penelitian ini mendapat data melalui penyebaran kuesioner sebanyak 53 yang di berikan pada pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini

Jumlah kuesioner yang di kembalikan dan dapat di gunakan sebanyak 49, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 92%. Adapun rincian dapat di lihat:

**Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah kuesioner	Presentase %
1	Distributor kuesioner	53	100%
2	Kuesioner kembali	49	92%
3	Kuesioner yang cacat/kembali	4	7%
4	Kuesioner yang dapat di olah	49	92%

N sampel yang kembali = 49

Responden rate = 92%

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2020)

Dari 53 kuesioner yang di bagikan kepada pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kta Palopo, terdapat 4 kuesioner yang cacat atau tidak kembali di karenakan pada saat di lakukan penelitian tidak semua pegawai berada di tempat. Sebanyak 49 orang pegawai berhasil di kumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini, Demogrfi responden dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2** Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin.

<b>Keterangan</b>	<b>Jumah (orang)</b>	<b>Persentase(%)</b>
<b>Jenis Kelamin :</b>		
a. Laki-laki	24	49%
b. Perempuan	25	51%
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 orang atau 49% responden berjenis kelamin laki-laki dan 25 orang atau 51% responden berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 4.3** Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin.

<b>Tingkat Pendidikan</b>		
a. SMA/Sederajat	16	33%
b. Diploma	2	4%
c. Strata -1 (S1)	29	58%
d. Strata -2 (S2)	2	4%
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa responden berpendidikan SMA/Sederajat sebesar 33% atau 16 orang, 4% atau 2 orang Diploma, 58% atau 29 orang sastra-1(S1), dan 4% atau 2 orang berpendidikan terakhir Sastra-2(S2).

#### 4.2.1 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata

(*mean*), standar deviasi nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Deskriptif Statistic Frekuensi Jawaban Responden

Variabel	Frekuensi					Total Sampel
	SS	S	R	TS	STS	
Pengendalian akuntansi (X <sub>1</sub> )	9	40	0	0	0	49
Sistem pelaporan (X <sub>2</sub> )	8	41	0	0	0	
Kejelasan sasaran anggaran (X <sub>3</sub> )	18	31	0	0	0	
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	22	27	0	0	0	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 49 responden untuk variabel Pengendalian Akuntansi (X<sub>1</sub>) menjawab “ Sangat Setuju (SS) 9 orang, yang menjawab “Setuju” (S) 40 , Sistem Pelaporan (X<sub>2</sub>) yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 8 orang, yang menjawab “Setuju” (S) 41 orang, Kejelasan Sasaran Anggaran (X<sub>3</sub>), yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 18 orang, dan yang menjawab “Setuju” (S) 31 orang, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y), yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 22 orang, dan yang menjawab “Setuju”(S) 27 orang.

### 4.3 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

#### 4.3.1 Uji validitas

Pengujian paliditas dalam penelitian ini di lakukan dengan cara statistik yaitu menghiyung korelasi antara masing–masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *produc moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari *corrected item-total correlation*> dari r table pada siknifikan 0,05 (5%). Berikut ini di sajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut.

**Tabel 4.5** Hasil uji validitas

Variabel	Item	r hitung	r Tabel	Keterangan	
<b>Pengendalian Akuntansi</b>	X <sub>1.1</sub>	0.525	0.281	Valid	
	X <sub>1.2</sub>	0.410	0.281	Valid	
	X <sub>1.5</sub>	0.306	0.281	Valid	
	X <sub>1.6</sub>	0.456	0.281	Valid	
	X <sub>1.7</sub>	0.636	0.281	Valid	
	X <sub>1.8</sub>	0.429	0.281	Valid	
	X <sub>1.9</sub>	0.554	0.281	Valid	
	<b>Sistem Pelaporan</b>	X <sub>2.1</sub>	0.513	0.281	Valid
		X <sub>2.2</sub>	0.485	0.281	Valid
X <sub>2.3</sub>		0.498	0.281	Valid	
X <sub>2.4</sub>		0.340	0.281	Valid	
X <sub>2.5</sub>		0.661	0.281	Valid	
X <sub>2.7</sub>		0.283	0.281	Valid	
X <sub>2.8</sub>		0.481	0.281	Valid	
X <sub>2.9</sub>		0.540	0.281	Valid	
<b>Kejelasan Sasaran Anggaran</b>		X <sub>3.1</sub>	0.478	0.281	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0.551	0.281	Valid	
	X <sub>3.3</sub>	0.289	0.281	Valid	
	X <sub>3.4</sub>	0.309	0.281	Valid	
	X <sub>3.6</sub>	0.477	0.281	Valid	
	X <sub>3.7</sub>	0.293	0.281	Valid	
	X <sub>3.8</sub>	0.499	0.281	Valid	
	X <sub>3.9</sub>	0.392	0.281	Valid	
	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	Y.1	0.453	0.281	Valid
Y.2		0.647	0.281	Valid	

<b>Instansi</b>	Y.3	0.718	0.281	Valid
	Y.4	0.564	0.281	Valid
	Y.5	0.568	0.281	Valid
	Y.6	0.340	0.281	Valid
	Y.8	0.707	0.281	Valid
	Y.9	0.738	0.281	Valid
	Y.10	0.578	0.281	Valid
	Y.11	0.366	0.281	Valid

Sumber: Data diolah di SPSS Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat di ketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel pertanyaan yang valid sebanyak 33 . Karena nilai *corrected item-correlation*> dari r tabel signifikan 0,05(5%).

#### 4.3.2 Uji Reabilitas Data

Reabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat di andalkan. Untuk mengukur nilai reabilitas di gunakan uji statistik *cronbach alpha* (a). jika *cronbach alpha* yang di bangun> 0,60 maka dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.6** Hasil Uji Realibilitas

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
,818	40

Sumber: data di olah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *cronbach alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,60 sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.



#### 4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7** Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,995	9,807		-1,631	,110
	Pengendalian akuntansi	,494	,160	,342	3,078	,004
	Sistem pelaporan	,509	,178	,327	2,862	,006
	Kejelasan sasaran anggaran	,704	,249	,309	2,825	,007

a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas x1 (pengendalian akuntansi) sebesar 0,004, koefisien variabel bebas x2 (sistem pelaporan) sebesar 0,006, dan koefisien variabel bebas x3 (kejelasan sasaran anggaran) sebesar 0,007. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = -15,995 + 0,494 x_1 + 0,509x_2 + 0,704 x_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- $X_1$  = Pengendalian Akuntansi  
 $X_2$  = Sistem Pelaporan  
 $X_3$  = Kejelasan Sasaran Anggaran  
 $e$  = Error

persamaan linear di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 15,995 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota palopo tetap sebesar 1,292.
- b. Nilai ( $\beta_1$ ) sebesar 0,494 menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian akuntansi ( $X_1$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel pengendalian akuntansi sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,494.
- c. Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) sebesar 0,509 menunjukkan bahwa sistem pelaporan ( $X_2$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel sistem pelaporan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,509.
- d. Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) sebesar 0,704 menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel kejelasan sasaran

anggaran sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,704.

#### 4.5 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Uji koefisien determinasi adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi  $R^2$  dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8** Koefisien Determinasi Adjusted  $R^2$

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,251 <sup>a</sup>	,063	,000	1,63293
a. Predictors: (Constant), Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, Sistem pelaporan				

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh  $adj.R^2$  dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen yang terdiri dari pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 6,0% sedangkan sisanya 84,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 4.5.2 Hasil Uji parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of signifikan* ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of signifikan* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Bilah  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40).

**Tabel 4.9** Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,995	9,807		-1,631	,110
	Pengendalian akuntansi	,494	,160	,342	3,078	,004
	Sistem pelaporan	,509	,178	,327	2,862	,006
	Kejelasan sasaran anggaran	,704	,249	,309	2,825	,007

a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi

Berdasarkan dari tabel 4.10 diketahui nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = n - k - 1 : \alpha / 2$$

$$= 49 - 3 - 1 : 0,05 / 2$$

$$= 45 : 0,025$$

= 1,800

Keterangan: n: jumlah

K: jumlah variabel bebas

l: konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Hasil pengujian hipotesis H1

H1 : pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan  $\text{sig. } t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika sebaliknya  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  dan  $\text{sig. } t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  yaitu  $3,078 > 1,800$  dan  $\text{sig. } t (0,004) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima maka Dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Hasil pengujian hipotesis H2

H2 : sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig.t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika sebaliknya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig.t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $2,862 < 1,800$  dan  $sig.t (0,006) < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3. Hasil pengujian hipotesis H3

H3 : kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig.t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan jika sebaliknya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig.t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $2,825 < 1,800$  dan  $sig.t (0,007) < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. dari hasil

pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 4.5.3 Hasil Uji Simultan (uji F)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau devenden. Hasil dari uji F ini dapat di lihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.10** Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	462,132	3	154,044	18,578	,000 <sup>b</sup>
	Residual	373,133	45	8,292		
	Total	835,265	48			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas kinerja instansi						
b. Predictors: (Constant), Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, Sistem pelaporan						

Pada tabel 4.11 di atas dapat di lihat nilai F sebesar 18,578 dengan nilai signifikannya 0,000 nilai signifikan tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat di gunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain bahwa, **Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

## **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.6.1 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,494 dan memiliki nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi (accounting control) adalah prosedur yang digunakan untuk menjamin akurasi dalam fungsi penyimpanan catatan (transaksi keuangan) tujuannya adalah untuk membuat sumber data tertentu di tempatkan pada sistem yang baik dan benar.

### **4.6.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis kedua penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,509 dan memiliki nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Hasil penelitian



menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil dalam penelitian ini Menurut Midjan (1986: 85) sistem pelaporan yang baik adalah “Dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

#### **4.6.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sistem kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_3$ ) sebesar 0,704 dan memiliki nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain :

1. kurangnya sikap kepedulian dari responden didalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode surfey wawancara untuk

meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.

2. Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel independen untuk mengetahui pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapat hasil yang maksimal di perlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner tetapi dapat juga dilakukan juga dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan di isi agar data yang diperoleh nantinya tidak bisa dan sesuai dengan tujuan apa yang di harapkan dalam penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN

### JURNAL

- Siti Ruri Suhaesti 2016 . Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bangkalis). *JUM Fekom* vol 3, no 1
- Pratama R., Agustin H & Taqwa S. 2019. Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Explorasi Akuntansi, 1(1) Seri D*.
- Herawati, Netty 2011. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi. *Jurnal penelitian (online).vol 3 no.2*
- Kusuma Ningrum 2018. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten situbondo. *E-JRA Vol 7*
- Diah Pancelina 2019. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daera kabupaten jombang. *Jurnal akuntansi AKUNESA, Vol 7 no 3*

### SKRIPSI

- Cahyani dan utama (2015) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Eko Setiawan (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Harini Susilowati (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)
- Heri setiawan(2017) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan manajerial sebagai variabel moderating

- Hidayahtullah, herdjiono(2015) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD di marauke
- Karismawati Agustina (2018). Pengaruh kejelasan Sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta)
- Lumenta, morasa dan mawikere(2016) Pengaruh pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota minahasa selatan
- Mulyadi AR (2018). Pengaruh sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh.
- Rio Pratama(2019). Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman
- Riska Dwi Fitriana (2018). Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Dan Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah kabupaten situbondo
- Wahdatul, rahayu, dan dillak(2016) Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bandung
- Zakiyudin dan Suyanto (2015). Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada inspectoral jendral kementrian agama RI.
- BUKU**
- Abdul Hafiz Tanjung, S.E., M.Si. ,Ak. Akuntansi Pemerintahan daerah Berbasis Akrual penerbit: ALFABETA, cv
- Ahmad Yani, SH., MM., Ak. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di indonesia.
- Baldric Siregar. Bambang Suripto, Akuntansi Manajemen. Salemba Empat
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. penegelolaan keuangan dan asset daerah sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Bandung: Fokus media
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisikelima. Penerbit Andi Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat

### **WEBSITE**

Siaran PERS, BPK RI Propensi Sulawesi Selatan. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

### **DOKUMEN RESMI PEMERINTAH**

Inpres nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.  
Intruksi presiden No : 7 tahun 1999, tanggal 15 juni 1999, tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Lembaga administrasi Negara (LAN) dan Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP.2000) Mengemukakan laporan yang baik.

pasal 20 dan pasal 21 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

PP105 tahun 2000 dan PP108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggung jawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra

PP No 71 tentang standar akuntansi keuangan ( sap).

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapahal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

### **PAKAR DAN PARA AHLI**

(Ghozali, 2005:39). Pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari model kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP : 2000)

Darma (2004) Menyatakan bahwa salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi.

Garrison Dan Noreen (2000). Dalam safitri (2006) “ anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lain untuk suatu periode tertentu”

- Halim ( 2007 : 326) menjelaskan laporan bahwa laporan keuangan
- Isamaya ( 2005:4090) Pengertian Pelaporan Keuangan
- Kenis dalam Kurnis (2004) indikator yang di gunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran.
- Krismiaji (2010 : 18) pengendalian akuntansi (accounting control)
- Kusumaningrum (2010) sistem pengendalian akuntansi yang menggunakan informasi akuntansi di sebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi.
- Maddox (2000) menyatakan bahwa pengendalian adalah “ sebuah proses yang di lakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumberdaya di gunakan secara efisien dan efektif”.
- Mardiamo (2002). “wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang di lakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas public”.
- Maryanto(2007:1). Pengertian Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah
- Menurut (Alfari, 2000:62). Formulasi regresi linear berganda
- Midjan (1986 : 85) sistem pelaporan yang baik adalah “dapat memantau dan mengendalikan kinerja manager dalam mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan.
- Mulyanto (2009:1) sistem dapat diartikan sebagai berikut “sistem merupakan kumpulan dari elemen elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan”.
- Saputra (2014). Agar pengukuran sasaran efektif ada 7indikator yang di perlukan.
- Sasongko (2010). penyusunan anggaran.
- Suharono dan Solihin (2006) kejelasan sasaran anggaran
- Supriono (2000) Mahanani (2009). “anggaran adalah suatu rencana terinci yang di nyatakan secara fomaal dalam ukuran kuantitatif untuk meenunjukkan bagaimana sumber-sumber akan di peroleh dan di gunakan selama jangka waktu tertentu,umumnya 1 tahun”.
- Yusfaningrum (2005) “ anggaran merupakan podoman rencana managemen di masa yang akan datang memounyai beberapa manfaat.